

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

RDF Rorotan akan Dibangun

Gambir, Warta Kota

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI tengah fokus membangun Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.

Namun, DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov tidak berhutang saat membangun fasilitas tersebut.

Kepala Dinas LH Asep Kuswanto mengatakan, pihaknya bakal menggunakan APBD 2024 untuk membangun RDF.

"Kalau strategi berikutnya kami akan coba menggunakan dana APBD, mungkin nanti akan ada pembahasan lagi, pembahasan di komisi soal APBD penetapan di 2024," katanya usai rapat di DPRD DKI, Selasa (22/8/2023).

Ia yakin pembangunan RDF ini bisa menggunakan efisiensi APBD dari kegiatan lain dan dapat dibangun secepat mungkin.

Namun, ia perlu mengadakan rapat lagi dengan Komisi D DPRD DKI agar mengefisienkan anggaran.

"Itu nanti kita bahas di komisi D. Sementara ini DLH saja, sesuai dengan apa yang kami lakukan di Bantar Gebang," ucapnya.

Asep menambahkan, pihaknya akan fokus pembangunan awal di RDF Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.

Kemudian, pada tahun 2024 RDF Pegadungan, Jakarta Barat bakal dibuatkan rencana pembangunan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

"Mungkin Pegadungan akan kami buatkan reses nya di 2024," ucapnya.

Tolak Pinjaman Rp 1 Triliun

Sementara itu DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta agar mengurungkan niat melakukan pinjaman daerah ke Pemerintah Pusat hingga Rp 1 triliun. Pinjaman duit itu berkaitan dengan pembangunan pengolahan sampah RDF Plant.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, permohonan pinjaman yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini dikhawatirkan akan menambah beban keuangan daerah dengan kemungkinan terburuk mengorbankan kepentingan masyarakat Jakarta.

Dengan demikian, Prasapaan karibnya meminta Joko Agus Setyono selaku Ketua TAPD kembali mengkaji skema pembiayaan pembangunan RDF Plant yang rencananya akan dibangun di Rorotan, Jakarta Utara dengan menyisir ulang Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2024.

"Coba Pak lihat lagi (anggaran) yang gak prioritas dalam APBD diserut (disisir) dulu. Jangan sampai ini (pinjaman) membebankan keuangan pemerintah daerah dan mengorbankan masyarakat," ujar Prasetyo berdasarkan keterangannya pada Selasa (22/8/2023)

Prasetyo mengatakan, dirinya menyetujui apapun upaya Pemprov DKI untuk melakukan penanganan pada sampah

Jakarta yang telah masuk dalam kategori darurat. Sebab sejauh ini volume sampah di TPST Bantargebang, Bekasi sudah melebihi kapasitas penampungannya yang hanya seluas 21.879.000 meter kubik.

"Bantargebang ini tinggal tunggu meledaknya aja bos. Ini sudah stadium empat ini, bisa jadi stadium enam," selorohnya.

Permohonan pinjaman daerah ini sesuai surat Gubernur DKI Jakarta yang ditunjukkan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta dengan nomor 435/UD.02.03. Dalam surat tersebut Pemprov DKI Jakarta berencana akan melakukan permohonan pinjaman darah ke PT Saran Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 1 triliun. (faf/m26)